



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**  
**P-ISSN : 2621-0312**  
**E-ISSN : 2657-1560**  
**Vol. 6, No. 1 Tahun 2023**  
**DOI : [10.21043/politea.v6i1.20819](https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.20819)**

---

## Islam dan Konstruksi Politik Identitas Etnis di Lampung Barat

Gesit Yudha

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: gesit@radenintan.ac.id

Ade Selvyana

Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Email: adeselvyana2001@gmail.com

### **Abstract**

*This study examines the regional head and legislative elections in West Lampung where elites running as candidates are more likely to choose their partners based on ethnic representation to promote ethnic solidarity in the region. This article aims to explain the Islamic view of understanding the construction of identity politics in West Lampung. In this case, it uses explanatory qualitative which deals with the issue of regional sons becoming the main commodity in ethnic politics. The findings of this article show that Muklis Basri has established friendship and commitment to the traditional and customary leaders of Sai Batin in West Lampung. The form of his attention is that many traditional activities, and traditional Sai Batin ceremonies are made a permanent regional and tourism agenda in West Lampung Regency. Likewise, the proximity to the persuasive approach of the community, Mukhlis can attract community sympathy by paying great attention to local customs and the public interest. The existence of customary balancers has the authority to make decisions about the results of deliberations in this case mobilization to influence voters. From an Islamic perspective, the prevailing construction of blind fanaticism towards a particular group or tribe, known as ashobiyah, is considered contrary to the principles of equality and fraternity emphasized by this religion as well as the importance of viewing individuals based on their qualities, character and deeds, not their origin based on Q.S Al Hujurat:13.*

*Keyword: Politics, Saibatin, Mobilization*

## **Abstract**

Studi ini mengkaji tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum legislatif di Lampung Barat di mana elit yang mencalonkan diri sebagai kandidat lebih cenderung memilih pasangannya berdasarkan perwakilan etnis untuk mempromosikan solidaritas etnis di daerah. Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang pandangan Islam memahami konstruksi politik identitas di Lampung Barat. Dalam hal ini menggunakan kualitatif ekplanatif yang berkenaan masalah putra-putra daerah menjadi komoditas utama dalam politik etnik. Hasil temuan artikel ini menunjukkan bahwa Muklis Basri telah menjalin persahabatan dan komitmen kepada para pemimpin tradisional dan adat Sai Batin di Lampung Barat. Bentuk perhatiannya adalah banyak kegiatan tradisional, dan upacara tradisional Sai Batin yang dijadikan agenda tetap regional dan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat. Demikian juga kedekatan dengan pendekatan persuasif masyarakat, Mukhlis dapat menarik simpati masyarakat dengan memberi perhatian besar pada adat istiadat setempat dan kepentingan umum. Keberadaan penyeimbang adat memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang hasil musyawarah dalam hal ini mobilisasi untuk mempengaruhi pemilih. Pandangan Islam, konstruksi yang terjadi terhadap fanatisme buta terhadap kelompok atau suku tertentu, yang dikenal sebagai ashobiyah, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan persaudaraan yang ditekankan oleh agama ini serta pentingnya melihat individu berdasarkan kualitas, karakter, dan perbuatan mereka, bukan asal usul mereka berdasarkan Q.S Al Hujurat:13.

Kata Kunci: Politik Identitas, Saibatun, Mobilisasi

## **Pendahuluan**

Identitas etnis dalam implementasi sistem demokrasi di berbagai negara seringkali menjadi teka-teki. Sistem demokrasi dirancang untuk menerima relasi kuasa yang mampu mengakomodir dan menjamin tercapainya tujuan bersama, termasuk pengelolaan isu etnisitas dalam institusi politik dan demokrasi (*"The Politics of ethnicity and Identities"*).

Menurut Derks dan Roymans dalam studi mengenai identitas etnik yang dilakukan di Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam (Derks, T. And Roymans, N 2009) bahwa latar belakang dari disiplin ilmu ini kesimpulannya adalah isu kekuasaan, agama, hukum dan gender sering dihubungkan dengan bagaimana identitas etnis dikonstruksi. Karena etnisitas ditentukan oleh politik dan bukan sebaliknya, identitas etnis selalu dibangun dalam kaitannya dengan sistem politik. Selain itu, ada banyak skala di mana organisasi sosial dapat menunjukkan afiliasi etnis.

Sama hal seperti definisi Agnes Heller (M. Taufiq Rahman 2020:6) menurutnya politik identitas adalah sebuah konsep sekaligus gerakan politik yang menekankan perbedaan sebagai kategori politik utama. Meskipun setiap organisasi memiliki ideologi dan tujuan yang sama, tidak dapat dihindari bahwa tipe orang yang berbeda akan memiliki identitas yang berbeda pula. Setiap saat, sebuah identitas akan menjadi egois dan akan berusaha memecah belah. Ketika dikombinasikan dengan tujuan politik. Alhasil, selama proses pembelahan, akan terkumpul orang-orang yang memiliki kesamaan identitas ras, agama, atau suku.

Politik identitas merupakan metode memobilisasi massa dengan menggunakan identifikasi sebagai magnet untuk menarik orang-orang untuk tujuan memproses dan menyelesaikan kepentingan anggota kelompok secara mendalam. Otomatisasi identitas dapat menarik semua orang yang memiliki kesamaan dengan orang-orang dari agama, kebangsaan, dan budaya lain. Perasaan etnosentrisme kelompok secara bertahap menjadi, dimana kelompok masyarakat yang sudah terstruktur, akan merasa paling baik terhadap kelompok di luar dirinya, keadaan akan bergulir seperti bola salju hingga meningkat. Selain itu, ada banyak skala di mana organisasi sosial dapat menunjukkan afiliasi etnis. Bentuk etnis makro yang paling maju adalah Gaul dan Jerman. Kelompok sosial minor dalam masyarakat terkait dengan politik lokal di tingkat lokal atau regional (Derks, T. And Roymans, N 2009:1-2).

Perlu diketahui bahwa upaya demokratisasi yang dilakukan di Provinsi Lampung oleh partai politik dan DPRD khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2012-2021 khususnya di Kabupaten Lampung Barat melalui pelaksanaan pilkada berdampak langsung pada munculnya varian-varian pilkada. Kepentingan politik, termasuk etnisitas ini adalah fenomena umum setelah Orde Baru.

Kajian ini mengkaji politik identitas etnis sedangkan Asmu'ie mengkaji bagaimana politik etnis digabungkan (Asmu'ie 2006). Asmu'ie menggunakan teori sentimen primal Clifford Geertz (Clifford Geertz 1973) yang berpendapat bahwa perbedaan ras dan budaya akan menjadi inti konflik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Cressida Heyes menurutnya identitas politik adalah suatu jenis aktivitas politik yang secara teoretis didefinisikan berdasarkan hubungan interpersonal dan dinamika mendasar yang dialami oleh pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah politik yang menganut persamaan berdasarkan kesamaan kelompok untuk mencapai

tujuan tertentu, seperti memperoleh pengakuan atas identitas kelompoknya atau mengangkat derajat dan status kelompok.

Sejumlah studi kasus identitas etnis dalam politik menunjukkan 295.326 pemilih lokal yang memenuhi syarat mengikuti pemilihan kepala daerah Lampung Barat pada 2012. Jumlah ini mencakup pemilih laki-laki dan perempuan. Sebanyak 157.321 pria dan 138.475 wanita memberikan suara. Dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2007, jumlah ini meningkat sekitar 10% atau 200.456 orang (M. Tohamaksun 2012). Keikutsertaan Mukhlis Basri dalam kampanye pemilihan anggota parlemen 2019 pasca berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Lampung Barat juga tak kalah mirip, Mukhlis menjadi kandidat paling populer di daerah pemilihan Lampung 1 dan memenangkan tiga kursi (Dapil) (Satriawan 2019). Ada kepercayaan luas bahwa etnis Lampung lebih diutamakan dalam rekrutmen politik. Ungkapan tersebut berkembang menjadi "rakyat kita" (merujuk pada etnis Lampung) dan "bukan bangsa kita" (merujuk pada etnis non-Lampung). Selanjutnya, istilah "orang impor" diciptakan untuk merujuk pada kelompok etnis non-Lampung yang berkembang.

Menurut Fredrick Bart dan Zastro (Dewi Novianti dan Sigit Tripambudi 2014:121), kelompok etnis adalah kumpulan individu yang memiliki karakteristik yang sama seperti ras, agama, atau asal kebangsaan, sendiri atau dalam kombinasi, dan yang juga disatukan oleh seperangkat nilai budaya bersama. Dalam Liliweri 2005, Koentjaraningrat mendefinisikan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia dengan sistem interaksi, seperangkat konvensi yang mengatur interaksi tersebut. Ada rasa komunitas dan identitas yang mengikat semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan dalam kaitannya dengan "bangsa", suku bangsa merupakan konsep yang digunakan secara bergantian untuk mencirikan bangsa seperti Indonesia dari sudut pandang kebangsaan, yang menjadi konteks pengembangan budaya Hidayah dalam Liliweri, 2005. Menurut Martin Bulmer dalam Liliweri 2005, suku bangsa adalah kumpulan orang-orang dalam komunitas yang lebih besar. Memiliki narasi fakta atau asal yang sama, memiliki ingatan masa lalu yang terfokus pada satu atau lebih aspek simbolik. Identitas kelompok ditentukan oleh faktor-faktor seperti kekerabatan, agama, bahasa, pembagian wilayah, kebangsaan, etnis, dan penampilan fisik. Sedangkan etnisitas adalah pengertian yang menjelaskan: 1. status suatu

kelompok masyarakat berdasarkan budaya yang diwariskan secara turun-temurun; dan 2. status sekelompok orang berdasarkan budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya. 2. nilai dan norma budaya yang membedakan anggota satu kelompok dengan anggota kelompok lain. Anggota suatu suku bangsa pada umumnya menyadari kesamaan nilai budaya dan adat istiadat, bahkan telah menjadi identitas budaya untuk membedakan atau memisahkan diri dari kelompok lain. 3. penggolongan suku bangsa berdasarkan afiliasi, yaitu berdasarkan kelompok masyarakat mana yang diasosiasikan satu sama lain. Bahkan, itu digunakan sebagai identitas dan identifikasi orang-orang yang tergabung dalam kelompok etnis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, etnisitas selalu dikaitkan dengan kepercayaan yang berlebihan terhadap bahasa, agama, dan kebangsaan lain.

Dominasi etnis yang dominan seringkali merupakan komponen integral dari tradisi politik yang berlaku, seperti yang terjadi di Lampung Barat. sehingga kelompok etnis yang dominan hanya bisa mengkonsumsi dan menikmati politik. sikap politik yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi yang menjadi dasar bagaimana politik dipraktikkan saat ini. Masalah etnis terus digunakan secara teratur sebagai komoditas politik. Pilihan yang lebih maju dilakukan dalam pemilihan masalah. Awalnya, diyakini bahwa percampuran kelompok ras yang berbeda akan segera menutupi masalah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan islam memahami konstruksi politik identitas di Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksplanatif dengan menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, internet, buku dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembahasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Politik Identitas: dari Perspektif hingga Pelaku*

Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas telah menjadi sangat penting. Ini telah lama menjadi topik penelitian untuk politik identitas pascakolonial. Pemikir seperti Homi K. Bhabha, Gayatri C. Spivak, dan Ania Loomba adalah contoh nama yang biasanya disebutkan. Mereka disebut karena kontribusinya dalam membangun politik identitas sebagai wacana sejarah dan budaya yang mendalam. Sementara dalam literatur ilmu politik, terdapat perbedaan yang jelas antara identitas politik dan politik identitas. Identitas politik merujuk

pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik politik identitas maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik, sedangkan politik identitas merujuk pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik politik identitas maupun identitas sosial (Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang dan Haboddin 2012:119).

Politik identitas menjadi sumber dan alat politik dalam perebutan kekuasaan politik sangat mungkin terjadi dan semakin meluas dalam aktivitas politik sehari-hari. Akibatnya, para ilmuwan yang terlibat dalam wacana politik identitas melakukan upaya bersama untuk menafsirkannya kembali menggunakan logika yang jauh lebih sederhana dan lebih berguna. Seperti Heyes (Cressida Heyes 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai tanda kegiatan politik. Menurut Lukmantoro, politik identitas yang menitikberatkan pada ras, suku, gender, atau agama merupakan strategi politik yang mengutamakan kebutuhan konstituen suatu kelompok. Politik perbedaan juga dapat diekspresikan dalam istilah identitas politik. Politik Identitas adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk menyalurkan ambisi untuk mempengaruhi kebijakan dan penguasaan atas distribusi nilai hingga tuntutan yang paling mendasar, yaitu penentuan nasib sendiri berdasarkan prinsip-prinsip primal. Dalam format etnisitas, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, pencarian kedaulatan tanah oleh berbagai distrik administratif, dan terutama lahirnya gerakan celah. Sedangkan dalam konteks agama politik identitas, berbagai upaya untuk memasukkan nilai-nilai agama dalam proses pengambilan kebijakan, seperti penerapan norma syariah, serta upaya untuk membuat sebuah kota dikaitkan dengan agama tertentu (Nasrudin dan Nurdin 2019).

Menurut kaum liberal, individu adalah makhluk bebas yang tidak terikat pada keadaan budaya tertentu (diri yang tidak terkekang). Liberal percaya bahwa menghilangkan atribut konkret individu yang berasal dari komunitasnya akan menghasilkan penggambaran universal abstrak tentang "orang biasa" yang bebas dari sifat, nilai, dan identitas komunal yang diwariskan. Kemampuan untuk memilih tujuan berdasarkan preferensi pribadi adalah karakteristik tunggal yang dimiliki oleh orang atau subjek yang tidak berada dalam keadaan ini (Hardiman 2009:182). Selain itu, kaum liberal berpendapat bahwa istilah "subjek etis" dan "subjek hukum" mengacu pada identitas yang dibentuk oleh orientasi budaya dan

keyakinan agama ketika digunakan. Konsekuensinya, fokus pembahasan adalah pada identitas publik daripada identitas individu, yang mungkin berbeda seiring dengan perubahan orientasi hidup seseorang.

Politik identitas memang tepat jika dipadukan dengan tujuan memperoleh kekuasaan sepenuhnya atas nama agama. Namun, diperlukan tata kelola yang ketat agar tidak merembet pada persatuan bangsa yang majemuk karena singgungan pada perbedaan bisa menjadi bahaya. Ajaran agama Islam menekankan pentingnya persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan di antara semua umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau kelompok etnis. Dalam konteks ini, konsep "ashobiyah" merujuk pada fanatisme buta terhadap kelompok atau suku tertentu yang dapat menghalangi persaudaraan *universal* yang dianjurkan oleh Islam.

Islam menekankan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah yang setara di hadapan-Nya. Al-Quran menyatakan dalam Surat Al-Hujurat [49:13]:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

### *Konstruksi Politik Identitas di Lampung Barat: Kesetaraan dan Persaudaraan Etnik*

Geertz (Cliford Geertz 1973) berpendapat bahwa selalu ada peluang signifikan bagi sentimen primordial untuk tumbuh dalam latar negara bangsa yang baru berkembang, yang akan membantu sentimen etnis. Ini berkaitan dengan topik bagaimana masyarakat secara keseluruhan harus berpartisipasi dalam negara baru. Namun, sejumlah variabel berkontribusi terhadap perkembangan sentimen etnis.

Menurut Joseph Rothschild (Joseph Rothscild 1981), ada dua faktor yang terkait dengan munculnya sentimen etnis yang menjelaskan mengapa suatu komunitas etnis yang

awalnya menginginkan kebangsaan kemudian kehilangan orientasi nasionalisnya. etnisitas Kedua, ada individu yang mempengaruhi anggota kelompok etnis untuk menumbuhkan sentimen etnis yang pada akhirnya menghasilkan terciptanya bangsa yang merdeka.

Kekuatan agama yang bersifat fleksibel menghantarkan pada segala aspek yang mempunyai relevansi apapun, agama dapat masuk dan berkembang ditempat apapun. Hidup dalam setiap zaman yang memiliki ruang dan waktu berbeda namun sampai saat ini keberadaan agama tetap menjadi bahan perhitungan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai preseden bahwa agama mampu adaptif pada semua iklim perkembangan zaman (M. Taufiq Rahman 2020).

Elit politik dan administrasi memiliki waktu yang lebih mudah untuk menjalankan peran mereka setelah pengaturan baru. Elit daerah lebih mudah beradaptasi dalam menjalankan strategi politik untuk mencapai tujuan politik mereka, Para elite di kawasan juga lebih bersedia menggunakan etnisitas sebagai alat untuk memajukan tujuan politik mereka. Bahkan saat ini, etnis seseorang dapat digunakan secara efektif untuk menimbulkan masalah dan "melayani" sebagai batu loncatan untuk menaiki tangga politik atau administrasi. (Tabah Mayanah 2014). Situasi saat ini sangat berbeda dengan era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru secara resmi melarang penggunaan faktor SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam politik.

Identitas etnis direproduksi dalam ranah politik dari kontroversi “anak daerah” yang banyak dilakukan elit lokal untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politiknya. Dalam kaitan ini, Eindhoeven dengan tegas menegaskan bahwa gelombang reformasi telah memaksa para elite lokal memperkuat pengaruh identitas etnis dan menolak pemimpin daerah yang berlatar belakang non-etnis (Tabah Mayanah 2014). Kelompok etnis yang diidentifikasi sebagai penduduk asli suatu wilayah mencoba mempengaruhi politik lebih jauh. Akibatnya, etnis memainkan peran penting dalam politik kota. Dalam kontestasi pemilu legislatif 2019 dan kontestasi pemilukada 2012 di Lampung Barat, klaim kesetaraan dan persaudaraan etnik serupa dilontarkan.

Menurut Clifford Geertz (Cliford Geertz 1973:39), etnisitas adalah sifat, karakteristik, atau keadaan yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis, atau kelompok etnis itu sendiri. Geertz mencatat sejumlah sifat askriptif yang khusus untuk kelompok etnis, termasuk



hubungan darah, ras, pola dominasi, bahasa, agama, adat istiadat, geografi, dan sejarah. Menurut beberapa uraian di atas, isu etnis yang diangkat sebagai topik pemilu akan membuat politisasi etnis sangat mungkin terjadi. Padahal, etnisitas bisa mendorong fragmentasi sosial sebagai alat mobilisasi politik massa. Identitas berdasarkan etnis juga menikmati popularitas dengan cara ini, seperti halnya etnis. Pemilihan eksekutif partai dan legislator, penunjukan pegawai negeri, pemilihan kota langsung, dan perekrutan birokrat semua melibatkan etnis serta adanya kekerabatan sebagai akibat dari kualitas itu.

Etnis Lampung mendominasi peran publik dan politik di Lampung pada umumnya dan Lampung Barat pada khususnya pada masa Orde Baru. Semakin banyak kelompok etnis Lampung memegang peran politik dan administrasi. Masalah “Putra Daerah” merupakan reaksi atas peristiwa politik lokal yang terjadi belakangan ini. Menurut Firmanzah, memenangkan kontestasi pemilu dengan tetap mematuhi semua aturan dan regulasi menuntut partai politik untuk melacak dan menilai setiap taktik dan tindakan yang diambil oleh lawannya. Sebab, sesuai dengan prinsip “zero sum”, setiap kemenangan satu pemain mengakibatkan kekalahan bagi pihak lawan (Firmanzah 2008:33).

Isu etnis menjadi komoditas politik dengan nilai yang cukup tinggi. Ragam isu yang diinvestigasi semakin berkembang. Awalnya, diyakini bahwa percampuran kelompok ras yang berbeda akan segera menutupi masalah. Mengingat sebagian penduduk kita tetap tinggal di pedesaan yang homogen dan sangat sensitif terhadap persoalan identitas sosial. Jelang pemilihan kepala daerah (pemilukada) Lampung Barat periode 2012–2017, isu etnis Jawa dan Lampung kembali menjadi perbincangan hangat. Mukhlis Basri sering menghubungi masyarakat dan tetua adat selama kampanyenya, meminta persetujuan mereka untuk mencalonkan diri dalam pilkada 2012.

Mukhlis Basri dan Makmur Azhari tetap teguh dan setia pada tradisi Sai Batin dan tokoh adat dalam pertemuan belakangan ini, khususnya di Lampung Barat. Membangun daerah kelahiran harus diprioritaskan, terutama untuk anak laki-laki lokal, sesuai dengan kata yang digunakan individu kita saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah kita. Upacara adat Sai Batin yang telah dijadikan agenda tetap daerah dan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat merupakan contoh lain dari kepekaan Mukhlis Makmur terhadap tradisi (Cahyadi Muis 2020).

Menurut Dwyer (Dwyer dkk. 1999) salah satu aspek etnisitas adalah pembagian antara "orang dalam" dan "orang luar". Tanpa perbedaan ini, etnisitas tidak akan ada. Dalam "Kesetiaan", persaudaraan dan solidaritas dimaksudkan untuk menyatukan orang. Hal ini terutama berlaku untuk Lampung Barat, di mana ada rasa keterikatan dan pengabdian yang tulus di antara semua penduduk.

Berbeda dengan praktik politik berbasis kepentingan, politik etnisitas adalah metode mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif etnis yang sebelumnya ditekan, disamarkan, atau diabaikan oleh kelompok atau agenda politik. Oleh karena itu, etnisitas menjadi basis aktivitas politik dalam politik etnisitas daripada kepentingan. Menurut penuturan warga sekitar, Mukhlis adalah sosok yang bisa diandalkan dan setia pada tokoh-tokoh sejarah Sai Batin di Lampung Barat. Lingkungan ini cukup dekat dalam hal perhatian (Sobirin 2020). Selain itu, terjadi peningkatan proporsi kelompok etnis yang mencalonkan diri untuk kursi parlemen dan memegang jabatan pimpinan partai. Terbukti dari pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten dan kota semakin banyak calon keturunan Lampung. Pilkada langsung seringkali berpusat pada isu "anak daerah". Alhasil, pada tahun 2005, saat pilkada pertama digelar, dari enam pilkada di kabupaten dan kota di dua daerah Way Kanan dan Lampung Tengah, kepala daerahnya etnis Lampung, sedangkan tiga pasang orang Jawa dan satu pasang etnis Sumsel terpilih menjadi wakil kepala daerah (Arizka Warganegara 2014). Melihat polarisasi etnis sebagai peningkatan perolehan suara dalam hal ini efektif karena pemilih yang memiliki kecenderungan homogen dapat memungkinkan politisasi etnis di suatu daerah dalam pemilu/pilkada di beberapa kota di Indonesia, khususnya Lampung, dengan tetap mengedepankan egalitarianisme dan asas egalitarianisme. kebersamaan. pasangan etnis berasal dari daerah Sumatera Selatan, sementara lima calon wakil kepala daerah keturunan Lampung dan satu keturunan Jawa. Karena tampaknya petahana memenangkan pemilihan karena dukungan dan mobilisasi dari kelompok inti, maka tidak diragukan lagi ada banyak alasan pendukung dan tema pemersatu yang dapat ditelisik untuk menentukan penyebab sebenarnya dari kesuksesan petahana. Penduduk asli Sai Batin pada dasarnya adalah kolektivitas sosial dengan hukum internal dan rasa identitas yang kuat. Ini adalah sistem kehidupan yang diatur oleh hukum dan konvensi sosial serta hukum adat yang berkembang. Di samping karena perintah raja bersifat dapat dilaksanakan, maka juga tunduk pada prinsip

daulah. Sebaliknya, penyeimbang konvensional memiliki kekuatan untuk memutuskan berbagai hal setelah pertimbangan yang cermat (Pangeran Edward Syah Pernong 2020).

Tentu saja, fokus pada konsensus dalam upaya mendamaikan berbagai kepentingan masyarakat merupakan ciri lain dari pemerintah dan kewenangannya untuk mengatur dan menjaga stabilitas interaksi sosial para anggotanya. Hal ini menjadi masalah, terutama bagi incumbent yang memanfaatkan potensi putra daerah untuk mengembangkan keputusan daerahnya berdasarkan pertimbangan (Andri Meri Yusdiantoro 2020). Menurut Furnivall 2009, konsep kekerabatan muncul dari sifat “kekitaan” di antara para anggotanya. Untuk mengubah konsep polarisasi menuju pluralisme sejati, setidaknya satu kelompok etnis harus melakukan kontak atau hubungan dengan etnis lain di luar dirinya.

Aktualisasi politik berdasarkan pengelompokan dan kepentingan etnis ini dikenal dengan politik etnisitas. Politik berdasarkan identitas kolektif etnis yang secara historis disembunyikan, ditolak, atau diabaikan oleh kelompok dominan atau agenda politik dikenal sebagai politik etnis. Yang terjadi sebenarnya adalah politisasi etnisitas di Lampung Barat dengan mengakomodir kepentingan adat, menjadikan agenda tahunan sebagai syarat pemerintah daerah ketika Pak Mukhlis menang, dan tentunya kepentingan kegiatan adat sangat memprihatinkan. Dapat dikatakan bahwa ini dihasilkan dari pendekatan persuasif. Strateginya adalah pemimpin tradisional memiliki dampak sosial yang signifikan, sehingga sangat intens.

### *Pandangan Islam Dalam Memahami Ashobiyah (Solidaritas Kelompok) Pada Kontestasi Lokal*

Pertarungan politik identitas pada hakekatnya adalah perjuangan kelompok atau individu yang terpinggirkan (pariferi) pada sisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Strategi unik yang dilakukan Pak Mukhlis dan tim sukses bersama tokoh adat Sai Batin di Lampung Barat adalah melakukan kegiatan bersama tokoh adat Sai Batin tersebut, seperti dengan mengumpulkan tokoh adat untuk kegiatan formal. Mukhlis menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh tersebut. pemimpin dari masa lalu, khususnya Pangeran Edward Syah Pernong.

Aset terbesar calon *incumbent* adalah kemampuannya memanfaatkan potensi putra daerah untuk memajukan masyarakatnya. Dalam hal ini, Mukhlis petahana sebagai calon bupati Lampung Barat mengakomodir semua kepentingan dewan adat di Lampung Barat serta berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk mendekatkan konstituen. Tentunya kedekatan serta putra daerah yang ingin berkembang dan disambut baik oleh keturunan bangsawan dari Skala bekhak juga menjadi faktor. Dan berdasarkan standar tersebut, Mukhlis, putra daerah, memiliki kualitas pemimpin sesuai dengan ideologi atau hukum kerajaan skala Behakak, artinya individu yang mampu menjaga kedamaian dan kebhinekaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan, bertindak dengan kesetaraan dan sopan santun, Bermoral tinggi, akomodatif terhadap pemerintah, dan konsisten di Lampung Barat dalam mengutamakan aturan hukum dan nilai-nilai adat. Pemimpin politik dan administrasi daerah memiliki lebih banyak kemungkinan untuk memenuhi tugas mereka. Elit daerah lebih mudah beradaptasi dalam menjalankan strategi politik untuk mencapai tujuan politik mereka. Para elit di kawasan juga lebih bebas mengeksploitasi ketegangan etnis untuk memajukan agenda politik mereka. Bahkan saat ini, etnisitas dapat digunakan untuk menimbulkan masalah dan sebagai "kendaraan" untuk maju dalam karir politik atau administrasi. Tidak ada janji khusus yang dibuat untuk publik saat mencalonkan diri. Hanya saja ada program keagamaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang tersedia. Tidak diragukan lagi perlu menyediakan sumber daya manusia saat mengkampanyekan jabatan Menurut David Leviathan (David Leviathan 2003:37) Klaim yang dibuat adalah bahwa jika susunan pegawai lembaga pemerintah mencerminkan keragaman masyarakat Amerika, tingkat penerimaan publik akan jauh lebih besar. Legitimasi suatu kebijakan meningkat seiring dengan semakin luasnya keterwakilan kelompok masyarakat di dalam birokrasi. Namun, liberalisasi politik telah mendorong konsistensi politik di kalangan elit, yang berdampak pada ketidakberpihakan birokrasi. Alih-alih bertindak imparial untuk melayani masyarakat, para pekerja sipil telah berevolusi menjadi mesin politik yang digunakan untuk menggalang dukungan dan memenangkan suara dalam pemilihan kepala daerah, khususnya petahana. Teka-teki netralitas telah dihasilkan oleh keadaan dan keadaan politik yang dihadapi pejabat sipil.

Isu yang muncul dalam pelaksanaan rencana desentralisasi dalam kaitannya dengan kondisi birokrasi adalah belum didukung perangkat legislatif yang kuat dalam menegakkan netralitas birokrasi. Pejabat sipil dari kota dan desa yang berpartisipasi dalam kampanye Mukhlis berperan sebagai bagian dari teknik sosialisasi yang digunakan untuk membangun basis dukungan yang besar.

Mc Carthy dalam Tarrow (John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's) 1986:48) mengklaim bahwa ada dua kategori untuk struktur mobilisasi politik: kategori formal dan informal. Sementara jaringan kekerabatan dan persahabatan termasuk dalam kategori informal, lembaga dan kelompok masyarakat yang terstruktur termasuk dalam kategori formal. Dalam hal ini, Muklis sudah cukup lama terlibat aktif di partai PDIP, sehingga jelas ada koordinasi yang sangat kuat. Ia juga aktif terlibat dalam organisasi kesukuan atau ormas yang ada, sehingga mudah untuk sekedar mencalonkan diri.

Pandangan Islam, fanatisme buta terhadap kelompok atau suku tertentu, yang dikenal sebagai ashobiyah, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan persaudaraan yang ditekankan oleh agama ini. Rasulullah Muhammad saw. bersabda, "*Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan mengikuti suatu kelompok (ashobiyah) dan telah berjuang untuk tujuan itu, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa ashobiyah dapat menghalangi seseorang dari mengikuti ajaran Islam yang sejati. Islam mengajarkan pentingnya melihat individu berdasarkan kualitas, karakter, dan perbuatan mereka, bukan asal usul mereka. Dalam pandangan Islam, keutamaan seseorang ditentukan oleh takwa dan amal perbuatannya. Al-Quran menyatakan dalam Surat Al-Hujurat [49:13]: "*... Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.*" Dengan demikian, Islam menentang fanatisme buta terhadap kelompok tertentu (*ashobiyah*) dan mendorong umatnya untuk menjaga persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan di antara semua umat manusia, tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau kelompok etnis.

Visi dan misi yang telah dikembangkan juga dioperasionalkan sebagai bagian dari strategi kampanye yang digunakan dalam Pilkada 2012. Misalnya dengan mengelola proyek pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, memelihara budaya daerah,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesehatan. Selain itu, Mukhlis yang menjabat saat itu mengusulkan program-program berkelanjutan. Selain membina komunikasi, kelurahan Jabar dan warga Lampung Sai Batin juga dikerahkan bersama jaringan petani, pedagang, sunda subuh, dan petani.

Kampanye Mukhlis Basri dijalankan oleh staf kampanye. membangun jaringan mobilisasi politik oleh para relawan yang bekerja dengan kelompok-kelompok dari partai lokal atau daerah. Karena calon bupati merupakan produk yang harus dipantau perkembangannya setiap hari, tim ahli/tim kampanye menggunakan SWOT saat mencalonkan diri. Tim kampanye selalu melakukan evaluasi harian terhadap kampanye.

Perubahan politik, aturan permainan, dan struktur kelembagaan semuanya berdampak signifikan pada situasi. Politik tidak lagi hanya menjadi perhatian di tingkat federal; politik kota juga terpengaruh. Modifikasi ini sangat meningkatkan kekuatan masyarakat dan pemerintah daerah. Munculnya kesadaran etnis daerah dan lokal, yang memungkinkan etnis lokal mendapatkan kembali perannya, juga dipengaruhi oleh perubahan. Pada tingkat yang lebih dalam, semua transformasi politik yang ditimbulkan oleh liberalisasi politik menghadirkan peluang politisasi etnis. Rekrutmen untuk posisi publik juga melibatkan politisasi etnis, yang lazim di ranah politik.

Dengan memanfaatkan celah hukum yang sudah ada, proses rekrutmen jabatan publik dalam hal ini disesuaikan dengan preferensi dan kepentingan Bupati terpilih. Perkembangan politik tidak hanya memberi banyak pengaruh kepada pemimpin daerah, tetapi juga memicu kebangkitan etnis. Pada akhirnya, etnis mayoritas, sesuai dengan “kita”, menguasai arena politik, birokrasi, dan mesin ekonomi.

Kekuasaan akan terpelihara jika rezim didukung oleh kekuatan elite politik local penyokong dan kekuatan itu karena mobilisasi etnik yang mempunyai kekuatan *ashabiyah*. Namun demikian, ingatlah bahwa kekuasaan itu membuat penguasanya mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Disini peranan iman menjadi penting. Jika kaum beriman yang berkuasa, mereka selalu mengingat akan pengawasan oleh Sang Pencipta sehingga tindakannya tidak melebihi takarannya.

Ingatlah bahwa Allah Swt. mempunyai kuasa siapa yang dikehendaki berkuasa maupun terhina. Firman-Nya dalam surah ali-Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَنُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَنُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya, "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."

Jelas dalam ayat di atas agar utusan-Nya menyampaikan bahwa kekuasaan mengatur, mengurus, menetapkan dan mencabut, semuanya adalah di tangan-Nya. Pemilik kekuasaan dan menetapkan yang diberi kekuasaan maupun mencabut kekuasaan, maka jika seseorang hamba memperoleh kekuasaan janganlah menikmati kekuasaan itu dengan hidup berfoya-foya. Sebagian orang akan terpesona dengan kenikmatan dunia dan kadang menjadi tujuan hidupnya, inilah bahaya yang selalu mengintipnya dan saat berpaling pada-Nya maka tergelincirlah ia.

Kita kembali menyimak kehidupan sebelum Islam datang, solidaritas di kalangan masyarakat Arab dibangun berdasarkan hubungan darah. Kesukuan memegang peranan penting dalam masyarakat Arab. Seseorang bisa dilindungi atau diperangi karena faktor kesukuan. Sebuah konflik dan aliansi bisa terjadi karena faktor kesukuan juga. Maka pada masa pra Islam, fanatisme kesukuan sangatlah kuat.

Salah satu misi dari risalah Islam adalah mengganti *fanatisme* berdasarkan suku menjadi solidaritas berdasarkan ajaran agama. Hal ini berhasil dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad mengikat suku-suku yang berbeda bahkan agama yang berbeda dalam satu ikatan perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah merupakan ruh dari undang-undang banyak negara. Penulis katakan bahwa tatakelola kenegaraan itu telah diatur dengan baik oleh Islam melalui Piagam Madinah itu.

Islam tidak mengajarkan *ashabiyah* yang berlebihan, solidaritas berdasarkan keyakinan ini yang bisa menumbuhkan *Ukhuwah* (persaudaraan) diantara umat muslim. Persaudaraan ini bisa menciptakan suasana saling tolong-menolong, nasihat-menasihati dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan derajat *ukhuwah* ini akan menumbuhkan keeratan dalam hubungan antar orang dan antar organisasi, menumbuhkan ekonomi jika pemenuhan kebutuhan dapat diatasi sesama saudara.

## **Kesimpulan**

Perdebatan politik ini tidak akan lepas dari identitas agama. Ada anggapan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin umat Islam menjadi tema panjang yang tidak pernah ditelaah secara mendalam. Pada kenyataannya identitas islam mengindikasikan munculnya rasa kepemilikan dan komitmen yang dipegang individu atau golongan dalam beragama, baik secara kehidupan sosial dan keagamaan atau lingkup kehidupan pribadi secara kuat. Sama hal yang terjadi di Lampung Barat, kelompok adat Sai Batin membantu dan menggerakkan kemenangan Mukhlis Basri baik pada pemilihan kepala daerah 2012 maupun pemilihan umum legislatif 2019 dengan memenuhi tujuan politik mereka. Jika ada arahan dan saran dari tokoh adat atau raja, sikap politik suku ini akan dipatuhi (primordial). Secara internal, kewenangan dan fatwanya dianut sebagai pedoman hukum yang dapat mengontrol dan menjaga stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keharmonisan hubungan ketetanggaaan dengan lingkungan sekitarnya. Aset terbesar calon petahana adalah kemampuannya memanfaatkan potensi putra daerah untuk memajukan masyarakatnya.

Saibatin adalah kelompok kolektivitas sosial yang beragam, yang masing-masing memiliki perangkat hukum internalnya sendiri. Dari segi budaya, masyarakat adat Saibatin diatur oleh norma-norma sosial dan hukum adat yang ada dan tumbuh dalam kelompok yang bersangkutan. Adat dapat diseimbangkan dalam setiap keputusan berkat adanya lembaga perwatin adat, terutama jika menyangkut masalah adat dan sosial. Penyeimbang konvensional memiliki kekuatan untuk memutuskan setelah pertimbangan yang cermat. serta kampanye dan mobilisasi pengaruh pemilih Mukhlis menjalin hubungan baik dengan tokoh adat dan adat Sai Batin di Lampung Barat, di mana mereka berperan sebagai tim sukses untuk membimbing, mengajak untuk mendukung, memilih, dan berbagi bantuan pada strategi



Pemerintah Lampung Barat. Pimpinan Mukhlis Basri juga sangat memperhatikan adat Sai Batin. Ketertarikan itu diwujudkan dengan fakta bahwa Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan berbagai acara adat dan ritus Sai Batin yang telah diintegrasikan ke dalam tujuan kawasan dan pariwisata jangka panjang daerah. Mirip dengan kedekatan Mukhlis dengan masyarakat, gaya persuasif Mukhlis mampu merebut hati masyarakat dengan memperhatikan adat daerah dan kepentingan bersama.

## Referensi

- Andri Meri Yusdiantoro. 2020. “”Pak Muklis sudah aktif di partai sejak lama tentu koordinasi sangat solid ditambahkan aktif di organisasi kesukuan ataupun ormas yang ada sehingga tinggal menjalankannya saja, terlebih kesatuan suku itu yang dominan dalam mobilisasi kerabat satu akan menyampaikan dengan kerabat lainnya”.”
- Arizka Warganegara. 2014. “Lampung Post.” Diambil ([https://issuu.com/lampungpost/docs/selasa\\_\\_18\\_maret\\_2014](https://issuu.com/lampungpost/docs/selasa__18_maret_2014)).
- Asmu'ie. 2006. “Disertasi Asmu'ie 2006 menulis sebuah disertasi tentang integrasi politik di Kabupaten Ketapang dengan menggunakan landasan teori integrasi politik dan melalui sumber informasi dengan observasi langsung.”
- Cahyadi Muis. 2020. “faktor pertama karena Mukhlis incumbent. Faktor kedua kedekatan Mukhlis dengan tokoh-tokoh adat, kedekatan ini sudah dibangun Mukhlis pada saat 5 tahun sebelum periode ke 2 dia menjabat Bupati, bantuan serta perhatian yang diberikan Mukhlis pada adat istiadat di Lampung Barat ini yang menjad nilai lebih Mukhlis.”
- Cliford Geertz. 1973. *The Intepretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Cressida Heyes. 2007. *Identity Politic*. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- David Leviathan. 2003. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Derks, T. And Roymans, N. 2009. *The Role Power and tradition. Ethnic Contructs in Antiquity*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Dewi Novianti dan Sigit Tripambudi. 2014. “Studi Fenomenologi: Tumbuhnya Prasangka Etnis di Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12(2).

- Dwyer, Larry, Peter Forsyth, dan Rao Prasada. 1999. *Tourism price competitiveness & journey purpose*. Fort Worth Texas USA: Travel and Tourism Research Association.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiman, Francisco Budi. 2009. *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1986. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Pembeddings*. USA: Cambridge University Press.
- Joseph Rothchild. 1981. *Ethnopolitics A Conceptual Framework New York*. New York: Columbia University Press.
- Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang, dan Muhtar Haboddin. 2012. "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal." *Journal of Government and Politics* 3(1):109–26. doi: 10.18196/jgp.2012.0007.
- M. Taufiq Rahman. 2020. *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- M. Tohamaksun. 2012. "Pemilukada Lampung Barat 295.326 Pemilih." Diambil 4 November 2019 (<http://lampung.antaranews.com/berita/263984/pemilukada-lampung-barat-295326-pemilih>).
- Nasrudin, Juhana, dan Ahmad Ali Nurdin. 2019. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1(1):34–47. doi: 10.15575/hanifiya.v1i1.4260.
- Pangeran Edward Syah Pernong. 2020. "Kepaksiaan dimaksudkan dapat mempersatukan, di Lampung Barat perasaan dan rasa kesatuan begitu nyata, begitupun dalam pemilu setiap individu memiliki keeratan dan berkomitmen apabila mendukung salah satu calon".
- Satriawan. 2019. "PDIP Lambar Dominasi Kursi Legislatif, Mukhlis Basri Lolos ke Senayan." Diambil 4 November 2019 (<https://www.saibumi.com/artikel-93349-pdip-lambar-dominasi-kursi-legislatif-mukhlis-basri-lolos-ke-senayan.html>).
- Sobirin. 2020. "Ketua Tim Pemenang."
- Tabah Mayanah. 2014. "Strategi Politik Etnis Lampung Memanfaatkan Liberalisasi Politik Dalam Rekrutmen Jabatan Publik di Provinsi Lampung Tahun 1999-2007."